

**PEMBERDAYAAN PELAKU UMKM MELALUI PROGRAM PINJAMAN TANPA BUNGA
DALAM RANGKA PENINGKATAN JUMLAH UMKM
DI KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG**

Garin Dima Rahmatan

NPP. 32.0277

Asdaf Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung

Program Studi: Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Email: garindimarahmatan@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Romi Saputra, S.Sos., M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Bandar Lampung City, the capital of Lampung Province, ranks seventh in the number of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) among the 13 regencies and cities in the province. A significant decline in the number of MSMEs in the city was triggered by the impact of the Covid-19 pandemic. To address this issue, the City Government of Bandar Lampung issued Mayor Regulation Number 12 of 2021 concerning the Operational Guidelines for the Distribution of Productive Micro Business Capital Loans. However, the implementation of this interest-free loan program has not fully attracted MSME actors. **Purpose:** The purpose of this study is to describe the empowerment of MSME actors through an interest-free loan program, describe the supporting and inhibiting factors, and the efforts of the Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises Service of Bandar Lampung City in overcoming these inhibiting factors. **Method:** This research employs a qualitative approach with an inductive method. The data collection techniques include interviews, observations, and documentation. **Result:** The results show that the program has had a positive impact, especially for entrepreneurs who previously faced difficulties in accessing loans from formal financial institutions. Additionally, the number of MSMEs in Bandar Lampung City increased in 2024. Several obstacles were identified, including issues related to BI Checking status, limited personnel, and lack of comprehensive information dissemination to MSME actors. Efforts made include optimizing cross-sectoral collaboration, increasing institutional capacity through additional human resources, and enhancing MSME literacy and capacity through socialization and training programs. **Conclusion:** The Interest-Free Loan Program run by the Bandar Lampung City Government has made a positive contribution to increasing the number and capabilities of MSMEs through easier access to capital. The success of this program is supported by the development of human resources, strengthening market networks, and collaboration between related institutions. However, the implementation of the program still encounters several obstacles, such as obstacles related to BI checking status, limited assistants, and less than optimal dissemination of information to MSMEs. Various efforts have been made, including strengthening cross-sector cooperation, increasing the number of personnel, and increasing socialization and training. For the future, it is recommended to develop an integrated digital platform, increase the capacity of the apparatus, and strengthen partnerships with external institutions to support the sustainability of the MSME ecosystem.

Keywords: Empowerment, Interest-Free Loan Program, MSMEs

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kota Bandar Lampung sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung menempati urutan ketujuh dalam jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari 13 kabupaten/kota di provinsi tersebut. Penurunan signifikan jumlah UMKM di wilayah ini dipicu oleh dampak pandemi Covid-19. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Penyaluran Kredit Modal Usaha Mikro Produktif. Namun, implementasi program pinjaman tanpa bunga ini belum sepenuhnya menarik minat pelaku UMKM. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pemberdayaan pelaku umkm melalui program pinjaman tanpa bunga, mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat, dan upaya Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Mikro Kota Bandar Lampung dalam mengatasi faktor penghambat tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan wawancara, observasi, kemudian dokumentasi. **Hasil/Temuan:** bahwa program memberikan dampak positif, khususnya bagi pelaku usaha yang kesulitan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Selain itu, terjadi peningkatan jumlah UMKM di Kota Bandar Lampung pada tahun 2024. Adapun hambatan dalam pelaksanaan program mencakup permasalahan status BI Checking, keterbatasan personel pelaksana, serta kurangnya penyebaran informasi kepada pelaku UMKM. Upaya yang dilakukan antara lain optimalisasi kerja sama lintas sektor, penambahan sumber daya manusia, serta peningkatan literasi dan kapasitas pelaku UMKM melalui sosialisasi dan pelatihan. **Kesimpulan:** Program Pinjaman Tanpa Bunga yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan kontribusi positif dalam peningkatan jumlah dan kemampuan pelaku UMKM melalui akses modal yang lebih mudah. Keberhasilan program ini didukung oleh pengembangan sumber daya manusia, penguatan jaringan pasar, serta kolaborasi antar lembaga terkait. Namun, pelaksanaan program masih menemui beberapa kendala, seperti adanya hambatan terkait status BI checking, keterbatasan tenaga pendamping, dan kurang optimalnya penyebaran informasi kepada pelaku UMKM. Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk memperkuat kerja sama lintas sektor, menambah jumlah personel, serta meningkatkan sosialisasi dan pelatihan. Untuk masa depan, disarankan pengembangan platform digital terpadu, peningkatan kapasitas aparatur, dan penguatan kemitraan dengan lembaga eksternal guna mendukung keberlanjutan ekosistem UMKM.

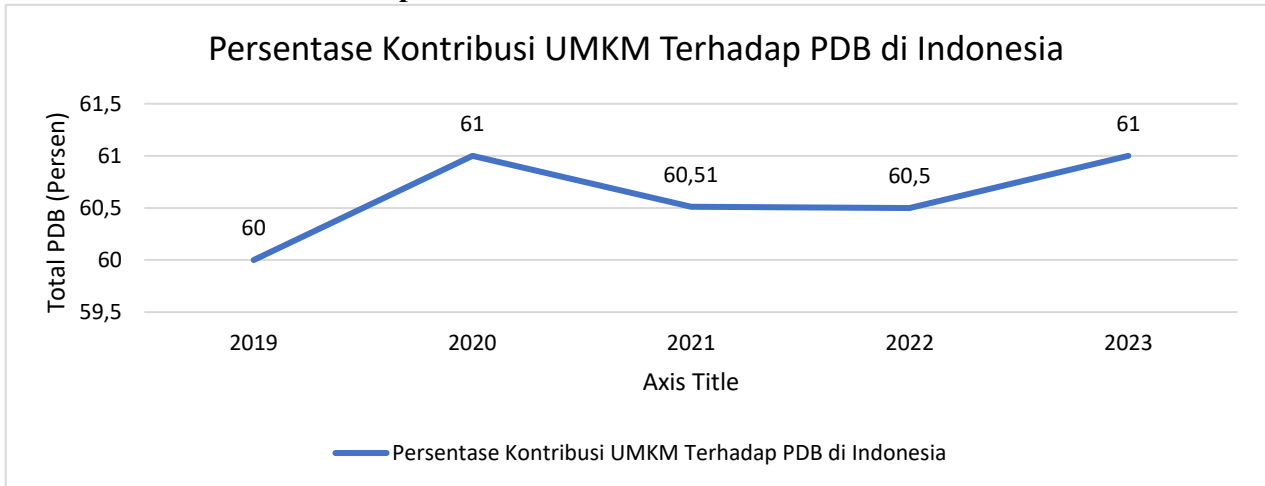
Kata kunci: *Pemberdayaan, Program Pinjaman Tanpa Bunga, UMKM*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Sebagai sektor ekonomi yang memiliki kapasitas besar dalam menyerap tenaga kerja, UMKM memberikan kontribusi substansial terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan pengurangan tingkat kemiskinan di berbagai daerah (Yolanda, 2024). Kontribusi tersebut dapat diidentifikasi melalui data yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. 1
Kontribusi UMKM Terhadap Produk Domestik Bruto dalam Waktu Lima Tahun Terakhir



Sumber: (Lokadata, 2024)

Berdasarkan data tersebut, UMKM memberikan kontribusi sebesar 61 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Lokadata, 2023). Hal ini diperkuat oleh publikasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), yang menegaskan bahwa peran UMKM sangat signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, dengan proporsinya mencapai 99 persen dari seluruh unit usaha yang ada. Pada tahun 2023, jumlah pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta, yang secara kolektif menyumbang Rp9.580 triliun terhadap PDB. Selain itu, sektor UMKM juga menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja, atau sekitar 97 persen dari total angkatan kerja di Indonesia (KADIN, 2024).

Akses terhadap modal usaha merupakan faktor krusial dalam pengembangan UMKM. Namun, banyak pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan dari lembaga keuangan formal, seperti bank. Kendala ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan aset yang dapat digunakan sebagai jaminan, rendahnya tingkat literasi keuangan, serta persyaratan administratif yang kompleks. Selain itu, suku bunga pinjaman yang tinggi di lembaga keuangan formal sering kali menjadi hambatan utama, terutama bagi UMKM yang baru memulai usaha atau sedang berada dalam tahap pengembangan. Akibatnya, banyak pelaku UMKM terpaksa mencari sumber pembiayaan alternatif melalui lembaga non-formal dengan suku bunga lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan usaha mereka.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah pusat dan daerah telah mengimplementasikan berbagai program pemberdayaan UMKM. Salah satu inisiatif yang menonjol adalah program pinjaman tanpa bunga, yang dirancang untuk menyediakan akses permodalan yang lebih terjangkau bagi pelaku UMKM, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal (Lampung Idn Times, 2024). Program ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan UMKM dengan memberikan stimulus bagi pengembangan usaha tanpa beban bunga pinjaman yang memberatkan. Di Kota Bandar Lampung, program pinjaman tanpa bunga diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan jumlah dan kualitas UMKM, sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

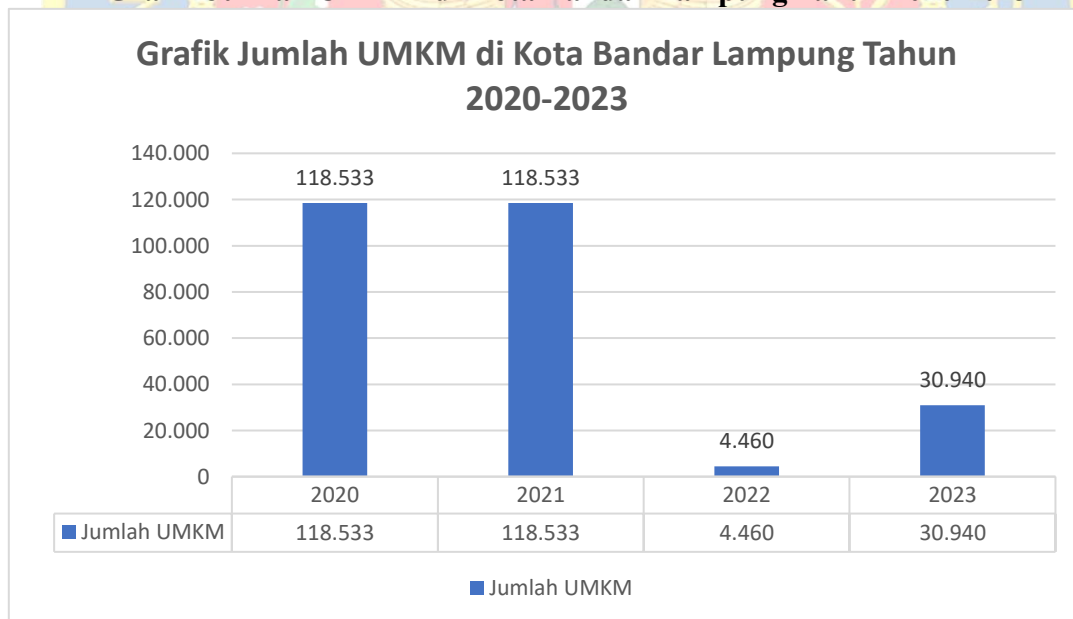
Pinjaman tanpa bunga merupakan bentuk intervensi kebijakan yang dirancang untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Melalui program ini, pelaku UMKM dapat memperoleh pinjaman modal dengan persyaratan yang lebih sederhana dan tanpa kewajiban pembayaran bunga. Skema pendanaan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan jumlah wirausaha baru serta mendukung pengembangan usaha bagi UMKM yang telah beroperasi. Dengan adanya akses modal yang lebih mudah dan terjangkau, pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, memperluas jangkauan pasar, serta menciptakan peluang kerja baru (Alea Casta Supriyadi et al., 2024).

Dari perspektif ekonomi daerah, pemberdayaan UMKM melalui program pinjaman tanpa bunga dapat memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan bertambahnya jumlah UMKM yang produktif, akan terjadi peningkatan output ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing produk-produk lokal di pasar domestik maupun internasional. Dalam jangka panjang, hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat permasalahan berkaitan dengan UMKM yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung yang dapat dilihat melalui tabel berikut.

Gambar 1. 1
Grafik Jumlah UMKM di Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2023



Sumber: (BPS Provinsi Lampung, 2024)

Grafik di atas menggambarkan dinamika jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung selama periode 2020 hingga 2023. Berdasarkan data yang disajikan, terjadi fluktuasi yang signifikan dalam jumlah UMKM pada kurun waktu tersebut.

Pada tahun 2020 dan 2021, jumlah UMKM tercatat berada pada angka yang sama, yaitu sebanyak 118.533 unit. Jumlah ini menunjukkan bahwa pada masa awal pandemi COVID-19, aktivitas UMKM di Kota Bandar Lampung masih dapat dipertahankan dengan relatif stabil. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan drastis jumlah UMKM menjadi hanya 4.460 unit. Penurunan ini menunjukkan adanya dampak lanjutan dari pandemi yang mulai terasa lebih signifikan terhadap sektor UMKM. Pada tahun 2023, jumlah UMKM menunjukkan peningkatan kembali menjadi 30.940 unit (BPS Provinsi Lampung, 2024). Maka dari itu, tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM dalam menghidupkan kembali usahanya adalah permasalahan akses permodalan.

Akses terhadap modal usaha merupakan faktor krusial dalam pengembangan UMKM. Namun, banyak pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan dari lembaga keuangan formal, seperti bank. Kendala ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan aset yang dapat digunakan sebagai jaminan, rendahnya tingkat literasi keuangan, serta persyaratan administratif yang kompleks. Selain itu, suku bunga pinjaman yang tinggi di lembaga keuangan formal sering kali menjadi hambatan utama, terutama bagi UMKM yang baru memulai usaha atau sedang berada dalam tahap pengembangan. Akibatnya, banyak pelaku UMKM terpaksa mencari sumber pembiayaan alternatif melalui lembaga non-formal dengan suku bunga lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan usaha mereka.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah pusat dan daerah telah mengimplementasikan berbagai program pemberdayaan UMKM. Salah satu inisiatif yang menonjol adalah program pinjaman tanpa bunga, yang dirancang untuk menyediakan akses permodalan yang lebih terjangkau bagi pelaku UMKM, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal (Lampung Idn Times, 2024.). Program ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan UMKM dengan memberikan stimulus bagi pengembangan usaha tanpa beban bunga pinjaman yang memberatkan. Di Kota Bandar Lampung, program pinjaman tanpa bunga diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan jumlah dan kualitas UMKM, sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Di Kota Bandar Lampung, program pinjaman tanpa bunga memiliki relevansi yang tinggi, mengingat banyaknya pelaku UMKM yang membutuhkan modal tambahan untuk mengembangkan usaha mereka. Salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota adalah menerbitkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2021 mengenai Pedoman Operasional Penyaluran Kredit Modal Usaha Mikro Produktif. Meskipun demikian, implementasi program ini belum sepenuhnya menarik minat pelaku UMKM. Berdasarkan data yang tersedia, dari sejumlah pengajuan yang diterima, hanya lima belas pelaku UMKM yang berhasil disetujui oleh Bank BNI, yang berperan sebagai mitra dalam pelaksanaan program tersebut (Kupas Tuntas, 2024). Meskipun jumlah penerima manfaat masih relatif terbatas, Pemerintah Kota Bandar Lampung terus berupaya untuk meningkatkan jumlah UMKM yang dapat mengakses pinjaman dengan bunga yang disubsidi oleh pemerintah (Lampost, 2024).

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan pemberdayaan UMKM. Penelitian Hendrianto Sundaro, Iwan Rudiarto, Wiwandari Handayani, dan Ahady Farrel Febriyanto yang berjudul " Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk

Meningkatkan Keberlanjutan Kampung Perkotaan dan Lanskap Budaya di Kota Semarang: Tinjauan Tipologi”. Hasil penelitian menunjukkan tiga tipologi kampung perkotaan berbasis UMKM di Kota Semarang: 1) Kampung kuliner, 2) Kampung warungan, dan 3) Kampung sembako. Tipologi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang upaya peningkatan keberlanjutan kampung perkotaan dan lanskap budaya (Sundaro et al., 2024). Penelitian Sulaiman Helmi, Bakti Setyadi, Ratna Sesotya Wedadjati, Muh. Asriadi AM, dan Nurhidayah Yahya yang berjudul “Pemberdayaan Perempuan UMKM: Pendekatan Berbasis Komunitas Terhadap Literasi Digital Dan Keterampilan Pemasaran” hasil penelitian mengungkapkan bahwa sebagian besar peserta memiliki pendidikan sekolah menengah atas dan pengalaman bisnis kurang dari lima tahun, menghadapi tantangan signifikan dalam mengadopsi teknologi digital dan memastikan keamanan daring (Helmi et al., 2025). Penelitian Samsuki dan M. Wispandono yang berjudul “Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Kreativitas dan Inovasi Produk: Studi Empiris Pelaku UMKM Kabupaten Pamekasan”, hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Komponen kreatif sangat membantu pertumbuhan UMKM; dan (2) Variabel inovasi produk berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM (Samsuki & Wispandono, 2025). Penelitian Ainaa Maulidya Zahra dan Novie Indrawati Sagita yang berjudul “Efektivitas Program Jakarta *Entrepreneur* (Jakpreneur) dalam Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Penjaringan Wilayah Jakarta Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) berjalan dengan baik, menyediakan berbagai fasilitas pendukung yang bermanfaat dalam pengembangan usaha (Zahra & Indrawati, 2023). Terakhir, penelitian Zen Kharis Fadilah, Uhkti Wahid, Hanifah, Susilowati, dan Ivan Mulyadi yang berjudul “Pemberdayaan UMKM Menuju Kesejahteraan Keluarga: Pengembangan Tata Kelola Manajemen Di Kecamatan Kebon Pedas, Sukabumi” hasil penelitian menunjukkan bahwa, bahwa UMKM di Kecamatan Kebon Pedas memiliki potensi yang dapat ditingkatkan melalui pengembangan tata kelola manajemen yang efektif. Beberapa hambatan, seperti rendahnya pemahaman tentang manajemen, keterbatasan akses pasar, dan kurangnya dukungan dari pemerintah, perlu diatasi untuk mempercepat pertumbuhan UMKM (Fadilah et al., 2024).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Terdapat perbedaan penelitian ini terhadap penelitian terdahulu, dimana lokasi penelitian yang dilakukan di Kota Bandar Lampung. Teori yang digunakan oleh penulis menggunakan teori Pemberdayaan menurut Mardikanto dan Subianto yang terdiri dari empat dimensi yaitu, Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan (Mardikanto & Subianto, 2013).

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pemberdayaan pelaku umkm melalui program pinjaman tanpa bunga, mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat, dan upaya Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Mikro Kota Bandar Lampung dalam mengatasi faktor penghambat tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai sosial yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu kejadian atau fenomena dan

keinyataan sosial. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang berdasar pada postpositivisme, yang dipakai untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Sugiyono, 2015).

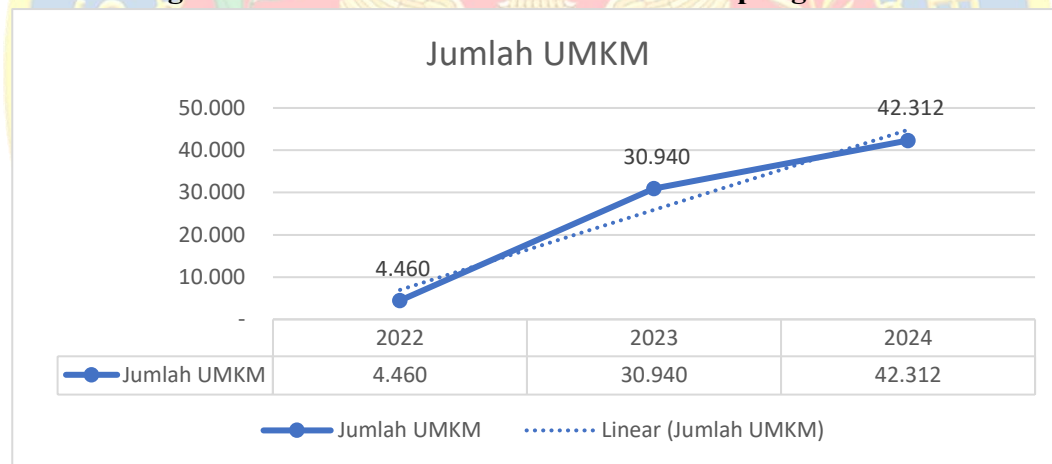
Penulis mengumpulkan observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai dengan apa yang dijelaskan Simangunsong (Simangunsong, 2017). Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap tiga informan yang terdiri dari, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam, Kepala Bidang Aset, dan Kepala Seksi Penilaian dan Pemanfaatan Aset.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pemberdayaan Pelaku UMKM Melalui Program Pinjaman Tanpa Bunga Dalam Rangka Peningkatan Jumlah UMKM di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung

Program pinjaman tanpa bunga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung merupakan upaya untuk meningkatkan akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang kerap mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Program ini menawarkan pinjaman modal usaha tanpa bunga dengan persyaratan administrasi yang lebih sederhana dibandingkan sistem perbankan konvensional. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, Perkembangan jumlah pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung dapat dilihat melalui gambar berikut ini.

Gambar 3. 1
Perkembangan Jumlah UMKM di Kota Bandar Lampung Tahun 2022-2024



Sumber: (Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, 2025)

Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa, program ini telah memberikan dampak positif yang signifikan, ditandai dengan meningkatnya jumlah UMKM yang mampu bertahan dan berkembang. Dalam judul penelitian yang dilakukan oleh penulis akan dijelaskan lebih lanjut dengan menggunakan teori Mardikanto dan Soebiyanto dimana Pemberdayaan Pelaku UMKM Melalui Program Pinjaman Tanpa Bunga Dalam Rangka Peningkatan Jumlah UMKM di Kota Bandar Lampung dianggap berhasil apabila telah memenuhi empat variabel yaitu, bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan.

3.1.1. Bina Manusia

Dalam dimensi tersebut terdapat satu indikator yang menjelaskan dari dimensi tersebut diatas yang dijelaskan dalam sub bab berikut:

3.1.1.1. Pengembangan Kapasitas sumber daya manusia (individu dan kelompok)

Indikator penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemberdayaan UMKM mencerminkan peningkatan kualitas dan kompetensi baik pada tingkat individu maupun kelompok. Hal ini mencakup pengembangan keterampilan teknis, manajerial, serta kemampuan adaptif terhadap dinamika usaha. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 5 memberikan landasan hukum dalam penyaluran kredit modal usaha, yang sejalan dengan strategi peningkatan kapasitas pelaku UMKM.

Hasil wawancara dengan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, serta Kepala Tim Lingkup Pemberdayaan Usaha Mikro, menunjukkan bahwa program pinjaman tanpa bunga diintegrasikan dengan pelatihan dan pendampingan usaha. Program ini bertujuan tidak hanya menyediakan akses permodalan, tetapi juga meningkatkan kapasitas manajerial UMKM melalui pelatihan keuangan, pemasaran, dan pengembangan produk. Meskipun sebagian pelaku usaha telah mengelola keuangan secara baik, masih terdapat tantangan dalam pencatatan dan alokasi dana yang efisien. Oleh karena itu, upaya pendampingan terus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak guna mendorong pertumbuhan UMKM yang lebih mandiri dan berdaya saing di Kota Bandar Lampung.

3.1.2. Bina Usaha

Dalam dimensi tersebut, terdapat dua indikator yang mengukur pentingnya pemberdayaan dalam program pinjaman tanpa bunga yang dijelaskan dalam sub bab berikut.

3.1.2.1 Peningkatan Aksesibilitas Modal

Indikator aksesibilitas modal menekankan pentingnya kemudahan bagi pelaku UMKM dalam memperoleh pendanaan untuk mengembangkan usaha. Akses yang lebih luas terhadap modal memungkinkan peningkatan kapasitas produksi, inovasi, dan daya saing. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 2 menetapkan bahwa tujuan penyaluran kredit modal usaha mikro produktif adalah untuk memberikan akses permodalan, meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha, serta mengembangkan kualitas sumber daya manusia pelaku UMKM.

Hasil wawancara dengan pemangku kebijakan di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa program pinjaman tanpa bunga telah berhasil menyederhanakan prosedur pengajuan dan memperluas kerja sama, seperti dengan Bank BNI, guna menjangkau lebih banyak pelaku UMKM. Program ini dinilai efektif dalam meningkatkan kemudahan akses pembiayaan, meskipun masih menghadapi sejumlah kendala teknis seperti keterbatasan akses akibat BI Checking dan rendahnya literasi keuangan. Selain itu, kurangnya informasi dan minimnya partisipasi dalam sosialisasi prosedur juga menjadi hambatan bagi sebagian pelaku usaha.

Dengan demikian, meskipun program ini memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan UMKM, upaya penguatan tetap diperlukan melalui peningkatan literasi keuangan, pendampingan administratif,

dan optimalisasi sistem monitoring agar program dapat berjalan secara berkelanjutan dan efektif dalam mendukung pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung.

3.1.2.2 Pengembangan Jejaring dan Pasar

Indikator penguatan jejaring dan akses pasar menitikberatkan pada upaya memperluas koneksi bisnis serta memperluas jangkauan pasar bagi pelaku UMKM. Dengan jejaring bisnis yang kuat, UMKM dapat membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak seperti pemasok, distributor, dan investor, serta meningkatkan eksistensi produk di pasar yang lebih luas. Akses pasar yang lebih terbuka juga dapat dicapai melalui partisipasi dalam pameran dagang, pemanfaatan platform digital, dan kerja sama dengan sektor pemerintah maupun swasta.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung menunjukkan adanya program pendampingan lanjutan pasca pencairan pinjaman, berupa pelatihan strategi pemasaran, digitalisasi usaha, serta fasilitasi UMKM dalam mengikuti pameran di berbagai tingkatan. Dukungan ini diperkuat melalui data dari Dinas Koperasi dan UKM yang mencatat keberadaan 42.312 pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung pada tahun 2024.

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kepala Tim Lingkup Pemberdayaan Usaha Mikro mengonfirmasi bahwa pelatihan yang diselenggarakan mencakup pemasaran digital, branding, serta pemanfaatan e-commerce. Fasilitasi partisipasi dalam bazar dan pameran menjadi bagian penting dalam memperluas akses pasar. Pendampingan dilakukan secara aktif, termasuk konsultasi informal di luar jam dinas untuk menjangkau pelaku usaha yang membutuhkan bimbingan langsung. Salah satu pelaku UMKM juga mengakui bahwa pinjaman tanpa bunga telah membantu mengembangkan kapasitas usaha dan memperluas pasar melalui strategi pemasaran digital dan partisipasi dalam promosi produk.

Dengan demikian, program pendampingan dan penguatan jaringan usaha yang dilakukan pemerintah kota melalui Dinas Koperasi dan UKM telah berperan penting dalam mendorong UMKM menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan daya saing, serta menciptakan ekosistem usaha yang lebih berkelanjutan di Kota Bandar Lampung.

3.1.3. Bina Lingkungan

Dalam dimensi diatas, terdapat dua indikator yang menilai pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus mendapat dukungan dari berbagai lingkungan. Indikator tersebut dijelaskan dalam sub bab berikut.

3.1.3.1 Aspek Fisik

Indikator ini mengacu pada kondisi lingkungan fisik yang mempengaruhi kelancaran operasional UMKM, mencakup infrastruktur seperti akses jalan, transportasi, serta tempat usaha yang layak. Lingkungan fisik yang memadai sangat penting untuk mendukung efisiensi operasional, memperlancar distribusi produk, serta meningkatkan daya saing UMKM di pasar. Ketersediaan fasilitas umum seperti listrik dan air juga menjadi elemen penting yang tidak dapat diabaikan. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro menunjukkan bahwa kondisi fisik lingkungan di Kota Bandar Lampung umumnya mendukung kegiatan usaha mikro. Program

pinjaman tanpa bunga telah memberi dampak positif bagi UMKM, terutama dalam hal renovasi tempat usaha dan peningkatan fasilitas produksi. Namun demikian, masih terdapat tantangan seperti terbatasnya infrastruktur transportasi dan akses pasar di wilayah tertentu. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong perbaikan infrastruktur dasar sebagai bagian dari strategi penguatan sektor UMKM. Kepala Tim Lingkup Pemberdayaan Usaha Mikro menambahkan bahwa pemerintah daerah telah menyediakan fasilitas fisik, seperti ruang usaha bersama di lokasi strategis, untuk mempermudah pelaku UMKM dalam mengakses pasar. Selain itu, koordinasi dengan sektor swasta juga dilakukan guna memperbaiki infrastruktur distribusi produk dan efisiensi proses pengolahan.

Implementasi program pemberdayaan ini sejalan dengan Pasal 2 huruf c Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2021 yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia pengusaha penerima kredit. Sarana pendukung yang tersedia menjadi bagian dari upaya menyeluruh dalam menciptakan ekosistem usaha yang kondusif.

Dapat disimpulkan bahwa program pinjaman tanpa bunga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan fisik usaha UMKM. Dukungan ini mencakup penyediaan tempat usaha, perbaikan fasilitas produksi, serta penguatan infrastruktur distribusi, meskipun masih dibutuhkan upaya lanjutan untuk mengatasi tantangan aksesibilitas di beberapa wilayah Kota Bandar Lampung.

3.1.3.1 Aspek Sosial

Indikator ini mengacu pada kondisi sosial yang mempengaruhi perkembangan dan keberlanjutan UMKM, termasuk hubungan antara pelaku usaha dengan masyarakat, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya. Aspek sosial memainkan peran penting dalam mendorong interaksi, kolaborasi, dan pertukaran informasi yang mendukung terciptanya ekosistem usaha yang inklusif dan berkelanjutan. Keberadaan jaringan komunitas, dukungan masyarakat lokal, dan hubungan yang harmonis dengan berbagai pihak menjadi faktor strategis dalam memperkuat posisi UMKM di pasar.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa program pinjaman tanpa bunga tidak hanya memberikan kemudahan akses permodalan, tetapi juga meningkatkan kualitas hubungan sosial pelaku UMKM. Interaksi dengan komunitas lokal menjadi lebih intensif melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan, yang membuka peluang kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Hal ini memperkuat solidaritas sosial dan menciptakan iklim bisnis yang lebih inklusif di tingkat lokal.

Wawancara dengan salah satu pelaku UMKM juga menguatkan bahwa program ini telah memberikan ruang bagi tumbuhnya kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antar pelaku usaha. Selain memperoleh modal, pelaku UMKM merasakan manfaat dari terbentuknya jaringan sosial yang mendukung peningkatan kualitas produk dan strategi pemasaran. Pelatihan dan pendampingan yang diterima turut mempererat hubungan antar pelaku UMKM dan menumbuhkan rasa kebersamaan dalam menghadapi tantangan usaha.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program pinjaman tanpa bunga tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki kontribusi signifikan terhadap penguatan aspek sosial. Program ini memperkuat jejaring sosial, membangun kemitraan, serta menciptakan ekosistem usaha yang kolaboratif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya mendukung ketahanan dan pertumbuhan UMKM di Kota Bandar Lampung.

3.1.4. Bina Kelembagaan

Dalam dimensi diatas, terdapat empat indikator yang menilai pentingnya penguatan lembaga dalam mendukung UMKM. Indikator tersebut dijelaskan dalam sub bab berikut.

3.1.4.1 Komponen *Person*

Indikator ini mengacu pada pentingnya identifikasi yang jelas atas peran dan tanggung jawab setiap individu yang terlibat dalam kelembagaan. Kejelasan ini menjadi fondasi dalam membangun koordinasi yang efektif, efisiensi operasional, serta mencegah tumpang tindih tugas dalam pelaksanaan program. Dalam konteks pemberdayaan UMKM, peran personel kelembagaan, baik dari unsur pemerintah maupun tokoh masyarakat, menjadi kunci keberhasilan program, terutama dalam proses sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro menggarisbawahi peran strategis tokoh masyarakat sebagai penghubung antara pemerintah dan pelaku UMKM. Tokoh masyarakat terbukti efektif dalam menyampaikan informasi program, membangun kepercayaan publik, serta mendorong partisipasi aktif dari komunitas lokal. Peran ini semakin krusial mengingat keterbatasan sumber daya internal di dinas terkait.

Kepala Tim Lingkup Pemberdayaan Usaha Mikro menyampaikan bahwa kendala terbesar saat ini adalah jumlah personel yang terbatas, yaitu hanya 19 PNS dan 17 non-ASN, dengan hanya dua staf yang fokus langsung pada pemberdayaan usaha mikro. Kondisi ini menyebabkan pendampingan belum optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, dinas kerap melakukan kerja sama lintas bidang dan menyewa instruktur profesional untuk memenuhi kebutuhan pelatihan pelaku UMKM secara lebih spesifik dan mendalam.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program pinjaman tanpa bunga sangat bergantung pada efektivitas komponen person dalam kelembagaan. Kejelasan peran setiap individu, sinergi antar unit, dan keterlibatan tokoh masyarakat menjadi faktor penentu dalam optimalisasi implementasi program. Meskipun terdapat keterbatasan sumber daya manusia, upaya strategis seperti pelibatan lintas bidang dan tenaga profesional menjadi solusi yang penting untuk menjaga kualitas pelaksanaan program dan memastikan dampaknya terhadap pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung.

3.1.4.2 Komponen Kepentingan

Indikator ini mengacu pada kepentingan individu atau kelompok yang menjadi landasan utama dalam membentuk interaksi dan kolaborasi di dalam suatu kelembagaan. Dalam konteks program pemberdayaan UMKM melalui pinjaman tanpa bunga di Kota Bandar Lampung, kepentingan bersama yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan profesional menjadi faktor pendorong terciptanya sinergi antar pelaku UMKM, pemerintah, dan sektor swasta. Kejelasan dan keselarasan kepentingan berbagai pihak dapat memperkuat komitmen kolaboratif yang dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, diketahui bahwa program ini telah dirancang untuk mengakomodasi kepentingan berbagai pihak: UMKM memperoleh akses permodalan, pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja, sementara sektor swasta mendapat peluang kemitraan dan perluasan pasar. Namun, tantangan

tetap ada dalam menjangkau kelompok masyarakat yang kurang akses terhadap informasi dan fasilitas program, sehingga diperlukan upaya perbaikan komunikasi dan pelibatan tokoh masyarakat. Sementara itu, Kepala Tim Lingkup Pemberdayaan Usaha Mikro menjelaskan bahwa pendekatan partisipatif menjadi dasar perumusan tujuan program. Pemerintah daerah melibatkan pelaku UMKM melalui forum diskusi, konsultasi publik, dan survei untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan nyata. Evaluasi dan umpan balik rutin dilakukan agar program tetap relevan dan sesuai dengan dinamika di lapangan.

Dari sisi pelaku UMKM, program ini dinilai telah mengakomodasi kepentingan usaha mereka, khususnya dalam hal akses modal untuk pengembangan usaha. Namun demikian, mereka juga mengharapkan peningkatan fasilitas pendampingan, terutama terkait pengelolaan dan pemasaran usaha, guna meningkatkan efektivitas penggunaan dana serta daya saing produk.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan komponen kepentingan dalam kelembagaan program pinjaman tanpa bunga memainkan peran penting dalam menciptakan sinergi antar aktor. Meskipun telah mencakup kepentingan berbagai pihak, keberhasilan jangka panjang program masih membutuhkan penguatan strategi komunikasi dan pelibatan semua pemangku kepentingan secara menyeluruh untuk menjamin manfaat yang lebih merata dan berkelanjutan.

3.1.4.3 Komponen Aturan

Indikator ini menekankan pentingnya keberadaan seperangkat aturan dan prosedur yang menjadi landasan operasional suatu kelembagaan. Dalam konteks pemberdayaan UMKM, aturan tersebut mencakup regulasi terkait proses pengajuan, persyaratan, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi program. Aturan yang jelas, adil, dan terstruktur sangat penting untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program, mencegah penyimpangan, serta menciptakan transparansi dan akuntabilitas di antara seluruh pihak yang terlibat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, pelaksanaan program pinjaman tanpa bunga telah memiliki dasar hukum yang kuat. Program ini dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, serta secara khusus diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Penyaluran Kredit Modal Usaha Mikro Produktif. Ketiga regulasi tersebut menjadi rujukan utama dalam memastikan bahwa pelaku UMKM memperoleh akses pembiayaan secara mudah, transparan, dan sesuai prosedur.

Lebih lanjut, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program, potensi konflik atau perbedaan kepentingan diatasi melalui mekanisme penyelesaian berbasis komunikasi terbuka dan mediasi. Forum diskusi yang melibatkan tokoh masyarakat, pelaku UMKM, pemerintah, dan apabila diperlukan pihak ketiga, menjadi media untuk mencari solusi yang adil dan objektif.

Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek aturan dalam kelembagaan program pinjaman tanpa bunga telah diterapkan secara sistematis melalui dukungan regulasi formal dan prosedur operasional yang terintegrasi. Tidak hanya menjamin pelaksanaan program secara tertib dan sesuai hukum, aturan ini juga menjadi dasar penting dalam membangun sistem penyelesaian konflik yang konstruktif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan.

3.1.4.4 Komponen Struktur

Komponen struktur dalam kelembagaan merujuk pada pembagian peran, tanggung jawab, dan hubungan kerja yang jelas di antara seluruh pihak yang terlibat dalam suatu organisasi. Struktur yang tertata dengan baik memungkinkan koordinasi dan kerjasama yang efisien, mencegah tumpang tindih tugas, serta memfasilitasi proses pengambilan keputusan secara tepat sasaran. Dalam konteks program pemberdayaan UMKM melalui pinjaman tanpa bunga, struktur kelembagaan berfungsi untuk memastikan bahwa pemerintah, pelaku UMKM, dan lembaga pendukung lainnya menjalankan perannya sesuai dengan mandat masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, program pinjaman tanpa bunga telah disusun dengan struktur yang mendukung komunikasi efektif dan kolaborasi antar pihak. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah, pelaku UMKM, dan lembaga terkait memungkinkan pelaksanaan program yang lebih optimal. Selain itu, pelaksanaan forum diskusi, pelatihan, dan kegiatan sosialisasi menjadi sarana komunikasi dua arah yang memungkinkan pelaku UMKM menyampaikan umpan balik dan memperoleh informasi program secara langsung.

Dengan struktur organisasi yang terencana, program ini mampu merespons kebutuhan lapangan secara lebih cepat, mendorong pelibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan, serta memperkuat kepercayaan antar pihak. Komponen struktur ini secara tidak langsung juga mendukung keberlanjutan program dengan memastikan bahwa setiap aktor kelembagaan memahami perannya dalam mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi lokal melalui penguatan sektor UMKM.

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberdayaan Pelaku UMKM Melalui Program Pinjaman Tanpa Bunga Dalam Rangka Peningkatan Jumlah UMKM di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung

3.2.1 Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, diperoleh tiga faktor utama yang menjadi pendukung keberhasilan program pemberdayaan UMKM melalui Program Pinjaman Tanpa Bunga, yaitu:

1. Bina Manusia

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan serta penyederhanaan prosedur akses permodalan tanpa bunga. Selain itu, perluasan pendanaan diwujudkan melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, sehingga memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam memperoleh modal usaha.

2. Bina Usaha

Penguatan jejaring pasar dilakukan melalui digitalisasi, pelatihan pemasaran, serta kemitraan dengan sektor swasta. Program ini juga mencakup pelatihan di bidang branding, e-commerce, dan pengelolaan jaringan bisnis, yang bertujuan meningkatkan daya saing serta memperluas jangkauan pasar UMKM di tingkat lokal maupun nasional.

3. Bina Kelembagaan

Sinergi antar pemangku kepentingan, seperti tokoh masyarakat, lembaga keuangan, dan instansi terkait, menjadi faktor penting dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan program. Keterlibatan berbagai pihak ini memberikan dukungan kelembagaan yang kuat bagi pelaksanaan program pemberdayaan UMKM.

3.2.1 Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM melalui Program Pinjaman Tanpa Bunga. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bina Usaha

Hambatan utama dalam aspek Bina Usaha berkaitan dengan aksesibilitas modal. Proses pengajuan pinjaman tanpa bunga terkendala oleh status *BI checking* para pelaku UMKM yang masih memiliki tunggakan pinjaman di perbankan, sehingga membatasi kesempatan mereka untuk memperoleh bantuan permodalan.

2. Bina Kelembagaan

Permasalahan berikutnya terletak pada aspek kelembagaan, khususnya minimnya jumlah personil yang tersedia untuk melakukan kegiatan pemberdayaan secara maksimal. Keterbatasan sumber daya manusia ini berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan program di lapangan.

3. Bina Kelembagaan

Selain itu, masih terdapat kendala dalam penyebaran informasi program kepada pelaku UMKM. Kurangnya sosialisasi menyebabkan sebagian pelaku usaha belum mengetahui adanya program pinjaman tanpa bunga yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, sehingga peluang pemanfaatan program menjadi terbatas.

3.3. Upaya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Kota Bandar Lampung dalam Mengatasi Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, terdapat sejumlah langkah strategis yang diambil untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Program Pinjaman Tanpa Bunga bagi pelaku UMKM. Upaya-upaya tersebut meliputi:

1. Dinas Koperasi dan UKM berupaya meningkatkan alokasi dana dengan menjalin kerja sama bersama pihak swasta serta lembaga keuangan. Langkah ini dilakukan untuk menambah ketersediaan modal pinjaman dan memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM.
2. Guna mengatasi keterbatasan personil, Dinas mengusulkan penambahan staf melalui formasi CPNS di tahun mendatang. Selain itu, upaya pemberdayaan juga diperkuat

melalui kolaborasi dengan relawan dan akademisi agar pendampingan terhadap pelaku UMKM dapat berjalan lebih optimal.

3. Untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi pelaku UMKM, Dinas Koperasi dan UKM secara intensif mengadakan sosialisasi mengenai manfaat program serta pelatihan literasi keuangan. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong pelaku usaha lebih aktif memanfaatkan fasilitas pinjaman tanpa bunga yang tersedia.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Selama melaksanakan penelitian penulis telah menemukan hal yang sama dengan penelitian terdahulu, dimana temuan penelitian penulis adalah kurangnya informasi yang disebar serta pengetahuan para pelaku UMKM. Hal ini sejalan dengan penelitian Sulaiman Helmi, Bakti Setyadi, Ratna Sesotya Wedadjati, Muh. Asriadi AM, dan Nurhidayah Yahya yang menunjukkan bahwa, mayoritas responden berpendidikan sekolah menengah atas dan memiliki pengalaman usaha kurang dari lima tahun. Kondisi ini menyebabkan mereka mengalami berbagai kendala, khususnya dalam proses adaptasi terhadap teknologi digital serta upaya menjaga keamanan di lingkungan daring. (Helmi et al., 2025).

Kemudian terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu, dimana penelitian Ainaa Maulidya Zahra dan Novie Indrawati Sagita yang menunjukkan bahwa, Program Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) terlaksana dengan efektif, menawarkan beragam fasilitas pendukung yang berperan penting dalam mendorong pengembangan usaha para pelaku UMKM (Zahra & Indrawati, 2023). Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis dimana hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa pemberdayaan sudah berjalan namun ada penghambat yang ditemukan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Program Pinjaman Tanpa Bunga yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah dan kapasitas UMKM melalui kemudahan akses permodalan. Program ini didukung oleh pengembangan kapasitas SDM, penguatan jejaring pasar, dan sinergi kelembagaan. Meski demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa status *BI checking*, keterbatasan personel, serta minimnya informasi di kalangan pelaku UMKM. Upaya yang dilakukan meliputi optimalisasi kerja sama lintas sektor, peningkatan jumlah personel, serta intensifikasi sosialisasi dan pelatihan. Untuk penelitian kedepan, disarankan pengembangan platform digital, penguatan kapasitas aparatur, dan perluasan kemitraan dengan lembaga eksternal guna memperkuat ekosistem UMKM yang berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengamanan aset daerah agar dapat memberikan masukan yang lebih luas.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandar Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alea Casta Supriyadi, Kayla Dora Iftachullah, Cindy Rahmawati Putri, Lintang Ayu Timuja, & Nazma Auliya Maulidina. (2024). Peran Bank dalam Pembiayaan UMKM dan Dampaknya terhadap Perekonomian Lokal. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 4(2), 152–163. <https://doi.org/10.55606/optimal.v4i2.3447>
- BPS Provinsi Lampung. (2024). *Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu*. <https://pringsewukab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzQ1IzI=/jumlah-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-lampung.html>
- Fadilah, Z. K., Wahid, U., Hanifah, Susilowati, & Mulyadi, I. (2024). *PEMBERDAYAAN UMKM MENUJU KESEJAHTERAAN KELUARGA: PENGEMBANGAN TATA KELOLA MANAJEMEN DI KECAMATAN KEBON PEDAS, SUKABUMI*. 2(3), 275–280.
- Helmi, S., Setyadi, B., Wedadjati, R. S., Muh. Asriadi, A. M., & Yahya, N. (2025). Empowering Msme Women: a Community-Based Approach To Digital Literacy and Marketing Skills. *Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi*, 9(1), 313–322. <https://doi.org/10.22437/jiituj.v9i1.32670>
- KADIN. (2024). *UMKM Indonesia - KADIN Indonesia*. <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>
- Kupas Tuntas - Program Pinjaman Tanpa Bunga Bagi UMKM di Bandar Lampung Terkendala BI Checking*. (n.d.). Retrieved October 6, 2024, from <https://kupastuntas.co/2023/12/12/program-pinjaman-tanpa-bunga-bagi-umkm-di-bandar-lampung-terkendala-bi-checking>
- Lokadata. (2023). *Kontribusi UMKM Terhadap PDB 2010-2023*. <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-2010-2023-1611277587>
- Mardikanto, T., & Subianto, P. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perpspektif Kebijakan Publik* (2nd ed.). Alfabeta.
- Pemkot Beri Pinjaman Tanpa Bunga bagi UMKM Pasar*. (n.d.). Retrieved October 6, 2024, from <https://lampost.co/ekonomi-dan-bisnis/pemkot-beri-pinjaman-tanpa-bunga-bagi-umkm-pasar/>
- Punya Program Pinjaman Nol Bunga, PIISEI Lampung Bantu UMKM*. (n.d.). Retrieved December 5, 2024, from <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/rohmah-mustaurida/ada-program-pinjaman-nol-bunga-piisei-lampung-bantu-umkm-perempuan>
- Samsuki, & Wispandono, M. (2025). Development of micro, small and medium enterprises through creativity and product innovation: Empirical study of Pamekasan regency MSME players. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1441(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1441/1/012046>

- Simangungsong, F. (2017). *Metode Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sundaro, H., Rudiarto, I., Handayani, W., & Febriyanto, A. F. (2024). Micro, small, and medium enterprises (MSME) to promote sustainability of urban kampongs and cultural landscape in Semarang City-Indonesia: An examination on the typology. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1394(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1394/1/012014>
- Yolanda, C. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170–186. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>
- Zahra, A. M., & Indrawati, N. S. (2023). Efektivitas Program Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) dalam Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Penjaringan Wilayah Jakarta Utara. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 260–274.

